

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dilihat dari perkembangan Negara kita Republik Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan sampai sekarang ini tergambar bahwa hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah telah mengalami Perubahan-perubahan, baik ditinjau dari segi keuangan maupun ditinjau dari segi pengawasan dan pembangunan. Suatu kenyataan bahwa pemberian sebagai kewenangan atas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam rangka mempercepat pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menunjang dalam pembangunan daerah.

Pemerintahan daerah diberi kewenangan yang cukup besar dalam kerangka Otonomi Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka kepala daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten dan kota bahwa desa merupakan pemerintahan terendah dibawah Camat yang mempunyai hak penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut, karena desa memiliki hak Otonomi asli yang berdasarkan asal usul desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan kep. Mendagri Nomor 634 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya, maka pemerintahan daerah harus memperhatikan pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat Desa, karena keberhasilan pembangunan pedesaan akan sangat ditentukan oleh terciptanya tertib administrasi pemerintahan desa yang baik. Terdapat dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 38 Tahun 2002, menjelaskan bahwa :

1. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa
2. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa
4. Pelaksanaan musawarah penyelesaian perselisihan masyarakat di desa
5. Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa dan menetapkan sebagai peraturan desa dengan persetujuan badan permusyawaratan desa (BPD).

Administrasi pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pengelolaan dan peningkatan serta pembangunan administrasi pemerintahan desa diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada pemerintahan desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sebagai suatu komponen penyelenggaraan Tugas-tugas pemerintah desa. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan masyarakat desa dan pada gilirannya dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa.

Perangkat pemerintahan desa dalam organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang dimaksud adalah :

1. Badan Permusyawaratan Desa
2. Kepala Desa
3. Sekretaris Desa
4. Kepala Urusan

Sebagai pemimpin pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Yaitu :

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Membina kehidupan Masyarakat Desa
3. Membina Perekonomian Desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa
5. Mendamaikan perselisihan Masyarakat Desa

6. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Berhubung pemerintahan desa beserta perangkatnya menjadi penentu dan merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan dan mensukseskan program pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa maka diharapkan perangkat desa tersebut memiliki kemampuan dan berperan aktif dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa, maka administrasi pemerintahan desa ini harus semakin meningkat agar pembangunan sistim administrasi pemerintahan desa semakin baik pula, khususnya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Mengingat administrasi pemerintahan tersebut mempunyai arti yang sangat penting sebagai sumber data statistik dan informasi mengenai masalah kependudukan dan masalah sosial ekonomi masyarakat desa, yang kemudian menjadi segala sumber data dan informasi pula bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional, maka penataan desa sudah selayaknya mendapat perhatian utama terutama data yang termuat dalam buku registrasi desa.

Untuk dapat memberikan hasil yang optimal didalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan desa maka diperlukan adanya kemampuan dan kemauan yang memadai baik dari segi kemampuan dan kualitas aparat pelaksanaan itu sendiri maupun dari pasilitas pendukung, termasuk juga kondisi pekerjaan yang dilaksanakan sehingga akan dapat diarahkan kepada adanya kesatuan tindakan dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang baik

bagikemajuan desa tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya kemampuan, kemauan serta sarana yang dapat mendukung kelancaran proses pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

Optimalisasi keberhasilan suatu pekerjaan sangat dipengaruhi oleh ketetapan pengorganisasian, sistim kerja yang dijalankan dan Unsur-unsur penduduknya, seperti mutu/kualitas Orang-orangnya serta sarana yang diperlukan. Dengan demikian akan dapat dicapai suatupenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya dan berhasil meskipun Sumber-sumbernya sangat terbatas”. (Suwigyo, 2001 : 13).

Kenyataan-kenyataan tersebut apabila dilihat pada Desa Lubuk Keranji dimana dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa oleh aparat mendapat kendala dan hambatan yaitu adanya keterbatasan kemampuan aparat pemerintahan desa itu sendiri, rendahnya pendidikan aparat, pengaruh budaya setempat, sulit menerima cara baru dan lain sebagainya. Akibat dari keterbatasan tersebut maka terkadang penerapan program pembangunan masyarakat desa mengalami kegagalan dalam administrasi.

Gambaran tersebut dijelaskan oleh Saporin (2004 : 45): “Hal-hal yang menyebabkan kurang berhasilnya pelaksanaan Program-program dan kebijakan pemerintah tersebut, pada umumnya disebabkan karena sering terjadi salah pengertian atau kesadaran terhadap Sifat-sifat, Kebiasaan-kebiasan, anggapan terhadap Cara-cara yang baru yang diintrodusir dalam masyarakat desa”. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek dalam pemerintahan desa juga sangat diperlukan supaya masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap

pelaksanaan administrasi pemerintahan tersebut sehingga nantinya bisa menciptakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik.

Desa Lubuk Keranji termasuk dalam naungan Pemerintah Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Desa Lubuk Keranji telah mempunyai pemerintahan desa dan perangkat desa, serta kantor kepala desa yang sangat memadai sebagai tempat untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang mampu bagi pelayanan dalam administrasi pemerintahan desa. Desa Lubuk Keranji dipimpin oleh Kepala Desa yaitu di bawah pimpinan Bapak Arisman Ja'afar dan dibantu oleh Bapak Endi Jufri, sebagai Sekretaris Desa Lubuk Keranji dalam menjalankan roda pemerintahan dan urusan administrasi pemerintahan. Selain itu juga, dibantu oleh beberapa kepala urusan seperti Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, dan Kepala Urusan Pembangunan hingga ketua RT dan RW. Namun demikian berdasarkan pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan administrasi pemerintahan desa di desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan masih belum terlaksana sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor gejala yang terlihat sebagai berikut :

- a. Tidak lengkapnya pengisian beberapa buah buku registrasi desa sebagai sumber data dan informasi primer dalam berbagi hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan warga masyarakat desa seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 :
Keadaan Pengisian Buku Registrasi Desa Lubuk Keranji Tahun 2012

No.	Buku Registrasi	Desa Lubuk Keranji	
		Lengkap	Tidak Lengkap
1.	Buku Data Keputusan Desa	-	-
2.	Buku Inventari Desa	-	-
3.	Buku Tanah Desa	-	-
4.	Buku Agenda	-	-
5.	Buku Expedisi	-	-
6.	Buku Data Induk Penduduk	-	-
7.	Buku Data Penduduk	-	-
8.	Buku Data Penduduk Sementara	-	-
9.	Buku Rencana Pembangunan	-	-
10.	Buku Kegiatan Pembangunan	-	-
11.	Buku Kader-kader Pembangunan	-	-
12.	Buku Anggaran Penyelenggaraan Rutin	-	-
13.	Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	-	-
14.	Buku Inventaris Proyek	-	-
15.	Buku Data Peraturan Desa	-	-
16.	Buku Pembantu Kas Pengeluaran	-	-
17.	Buku Kas Pengeluaran Rutin	-	-
18.	Buku Kas Pembantu Pemerintah	-	-
19.	Buku Anggaran Penyelenggaraan Pembangunan	-	-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Lubuk Keranji 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2012 kelengkapan pengisian buku registrasi desa dari 19 item yang harus dilengkapi hanya 14 item yang lengkap sesuai dengan standar yang berlaku. Maka administrasi pemerintahan desa ini harus semakin meningkat agar pembangunan sistim administrasi pemerintahan desa semakin baik pula, khususnya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa yang termuat dalam buku registrasi desa.

- b. Sarana dan pra sarana penunjang proses administrasi seperti peralatan kantor, alat transportasi belum menunjang.

Tabel 1.2 :
Sarana dan Pra Sarana Penunjang Proses Administrasi Pemerintahan Desa
Tahun 2012

No.	Jenis Alat-alat kantor	Unit	Kondisi
1.	Alat Komunikasi	-	
2.	Komputer	1	
3.	Mesin Tik	1	
4.	Meja Kerja	10	
5.	Kursi	10	
6.	Ruang Kerja	4	
7.	Lemari Arsip	2	
8.	Buku Petunjuk Pelayanan	4	
9.	Papan pengumuman	1	
10.	Ruang Tunggu	1	
11.	Kendaraan Dinas roda dua	2	
12.	Kendaraan Dinas roda empat	-	
Jumlah		36	Baik

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Lubuk Keranji 2012

Berdasarkan tabel diatas bisa dijelaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang proses pelaksanaan administrasi pemerintah Desa Lubuk Keranji tergolong rendah dan kurang mendukung untuk pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa. Oleh karena itu diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran proses pelaksanaan administrasi pemerintahan desa sehingga bisa menciptakan pelayanan yang baik.

Berangkat dari factor gejala di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa factor gejalalatar belakang diatas dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk Mengetahui Faktor penghambat Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintahan desa, khususnya pada Desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dan Pemerintahan desa pada umumnya dalam menyelenggarakan pemerintahannya.
2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa agar efektif.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengetahuan serta pandangan dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan desa Lubuk Keranji.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Talaah Pustaka

Pada bab ini akan dibahas talaah pustaka berisikan tentang landasan Teori-teori dan menyangkut Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan dibahas tentang Hal-hal yang berhubungan dengan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Serta Analisis Data.

BAB IV : Gambaran Lokasi Penelitian

Bab ini berisikan gambaran objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan di lakukannya penelitian, karakteristik dan demografi.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian ini tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan.

BAB VI : Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepan.